



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu, Kode Pos 94111
Telepon (0451) 421411 - 421812 Fax. (0451) 423612 - 421411
Email : info@sultengprov.go.id, Website : www.sultengprov.go.id

Palu, 18 Februari 2026

Nomor : 000.8.6.3/76/Ro.Org
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exp
Hal : Panduan Penyusunan Perjanjian Kinerja
Pejabat Struktural T.A 2026

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah

Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

di-

Tempat

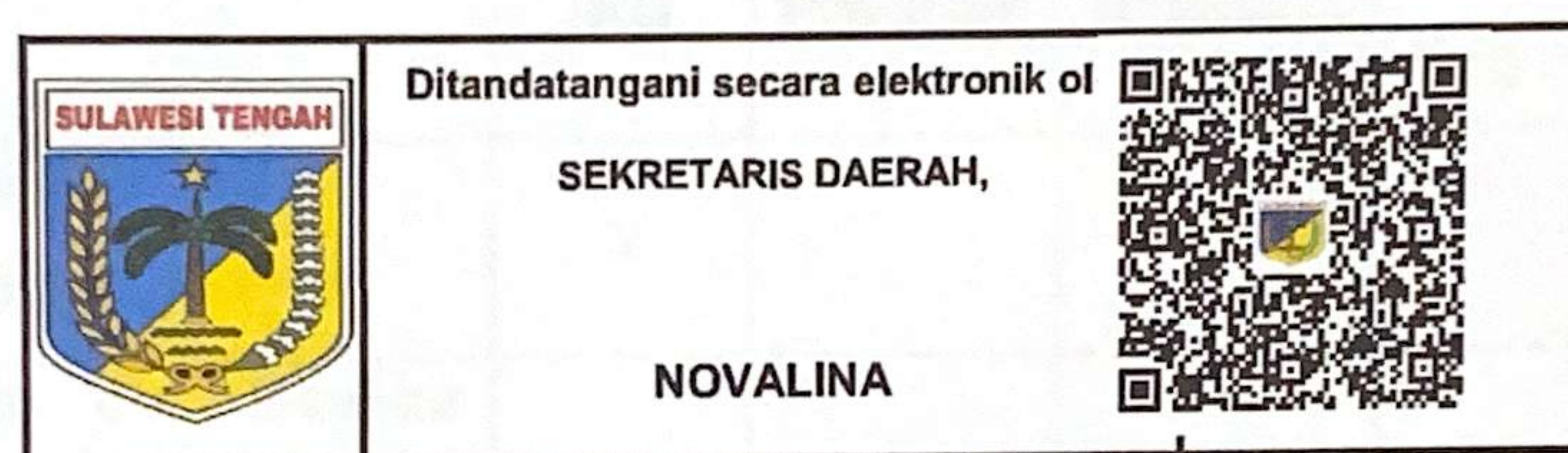
Dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan guna memastikan tercapainya target kinerja organisasi secara berjenjang, dengan ini disampaikan panduan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Seluruh Pejabat Struktural wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
2. Penyusunan PK harus mengacu pada asas *cascading* (penjenjangan kinerja), di mana indikator kinerja individu pejabat struktural harus mendukung langsung indikator kinerja utama (IKU) kepala perangkat daerah. Guna menjamin keselarasan dan ketepatan *cascading*, **Perangkat Daerah diwajibkan *mengupdate cascading* di aplikasi BERANI SELARAS dan melakukan koordinasi dengan mitra teknis pada Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.**
3. Panduan teknis pengisian format PK (sebagaimana terlampir) mencakup penetapan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan sasaran Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan target capaian yang terukur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV yang telah ditandatangani secara berjenjang wajib dihimpun dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah paling lambat tanggal **9 Maret Tahun 2026** melalui link <https://bit.ly/LKIP2025PK2026> .
5. Kualitas penyusunan Perjanjian Kinerja ini akan menjadi unsur penilaian dalam evaluasi SAKIP internal Perangkat Daerah dan evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah oleh Inspektorat Daerah dan KemenpanRB.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

**PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026**

- 1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja adalah pejabat Struktural lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2. Sasaran dan indikator kinerja Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra dan *cascading* di aplikasi BERANI SELARAS.
- 3. Penjenjangan kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jabatan	Pengampu Kinerja			
		IKU	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Kepala Dinas/Badan/ Sekwan/Sekda	√			
2	Kepala Biro dan Direktur RSU		√		
3	Kepala Bidang/ Kepala Bagian/ Sekretaris/ Kepala UPT		√		
4	Wakil Direktur/ Kepala Bagian/ Kepala Bidang pada Biro dan RSU			√	
5	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Dinas/Badan			√	√
6	Kepala Sub Bagian Biro & RSU				√

- 4. Bagi Perangkat Daerah yang pejabat strukturalnya telah disederhanakan/difungsionalkan, maka program, kegiatan dan sub kegiatan wajib diampuh oleh Pejabat Struktural satu tingkat di atasnya.
- 5. Pejabat Struktural dapat mendelegasikan kinerjanya kepada Pejabat Fungsional yang berkompeten melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Tim Kerja, sesuai

dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Format Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Contoh format Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Contoh Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS/BADAN/BIRO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Dinas/Badan/Biro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H ANWAR HAFID, M.Si**

Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Pa l u,

PIHAK PERTAMA

..... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS/BADAN/BIRO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1			
2			
3	Dst		

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Rp	APBD/APBN
2.	Rp	

Palu,
KEPALA DINAS/BADAN/BIRO

.....

Contoh Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIS



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Bidang/Bagian/Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas/Badan/Biro

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Palu,
Pihak Pertama

.....
.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIS

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1				Renstra
2				Cascading
3	Dst			

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Rp	APBD/APBN
2.	Rp	

Palu,

KEPALA DINAS/BADAN

KEPALA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIS

.....
.....

Contoh Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKSI/SUB BAGIAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Seksi/Sub Bagian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan : Kepala Bidang/Bagian/Sekretaris
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Palu,
Pihak Pertama

.....
.....

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA SEKSI/SUB BAGIAN

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	Keg : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah provinsi yang sesuai ketentuan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	...	Renstra
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	...	Renstra
		Dst		
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah provinsi yang sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah provinsi yang sesuai ketentuan		Cascading
		Dst		
2	Sub Keg : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			
	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)		Renstra
	Tersusunnya Dokumen Rancangan Awal RKPD 2027 Provinsi Sulawesi Tengah	(Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD 2027 Provinsi Sulawesi Tengah)		Cascading
	Terlaksanananya konsultasi publik	Jumlah berita acara konsultasi publik		Cascading

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Tersusunnya usulan perencanaan pembangunan kab/kota melalui Forum Perangkat Daerah Kab/kota	Jumlah usulan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota)		Cascading
		Jika sasaran & indikator Renstra = sasaran & indikator Cascading BERANI SELARAS			Renstra & Cascading

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Rp
2. Rp

APBD/APBN

Palu,

KEPALA BIDANG/BAGIAN

KEPALA SEKSI/KEPALA SUB BAG

.....

.....



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd**

Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si**

Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

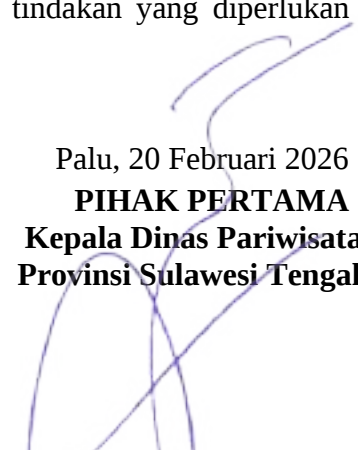
Pihak Pertama berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
Gubernur Sulawesi Tengah
ANWAR HAFID

Palu, 20 Februari 2026
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah

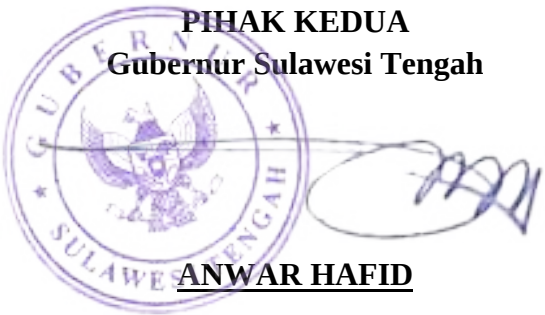

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Daya Dukung Usaha Jasa Pariwisata Daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,37 %
2.	Meningkatnya Daya Saing dan Perluasan Jaringan Pemasaran Destinasi Pariwisata Unggulan	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	28.750 Orang
3.	Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing Berbasis Kekayaan Intelektual	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	3,845 %

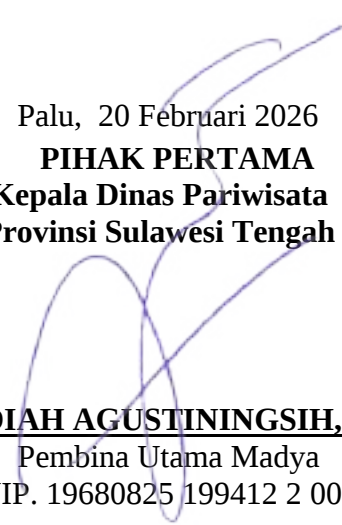
Program :	Anggaran:	Keterangan:
I. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 267.882.095,40	APBD
II. Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 145.540.000	APBD
III. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 3.607.056.100	APBD
IV. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 295.266.340	APBD
V. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.10.009.457.000,86	APBD

PIHAK KEDUA
Gubernur Sulawesi Tengah



ANWAR HAFID

Palu, 20 Februari 2026
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

PERJANJIAN KINERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **NENCY AINUN, S.Stp, M.Si**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : **Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd**
Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

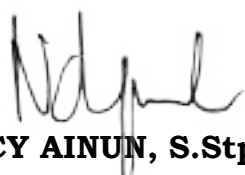
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2026



Pihak Kedua,
Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd

Pihak Pertama,

NENCY AINUN, S.Stp, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Esselon III

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	2	3	4	5
Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	60	Renstra dan Cascading
1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan Kinerja - Tersusunnya Dokumen Perencanaan - Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) - Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) - Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7 4 16 1	Renstra dan Cascading
a. Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	- Tersedianya Dokumen Renja Perubahan - Tersusunnya Dokumen Manajemen Resiko - Tersusunnya Dokumen SPIP - Tersusunnya Laporan Kinerja RKPD dan RKPD Perubahan - Tersusunnya Dokumen Anggaran RKA dan RKAP	- Jumlah Dokumen Renja Perubahan (Dokumen) - Jumlah Dokumen Manajemen Resiko (Dokumen) - Jumlah Dokumen SPIP (Dokumen) - Jumlah Laporan Kinerja RKPD dan RKPD Perubahan (Laporan) - Jumlah Dokumen Anggaran RKA dan RKAP (Dokumen)	1 1 1 2 2	Cascading

	• Tersusunnya Dokumen Anggaran DPA dan DPAP • Tersedianya Dokumen PK dan PK Perubahan • Tersusunnya Dokumen Probis • Tersedianya Dokumen Gender • Tersedianya Dokumen Renja	• Jumlah Dokumen Anggaran DPA dan DPAP (Dokumen) • Jumlah Dokumen PK dan PK Perubahan (Dokumen) • Jumlah Dokumen Probis (Dokumen) • Jumlah Dokumen Gender (Dokumen) • Jumlah Dokumen Renja (Dokumen)	• 2 • 2 • 1 • 1 • 1	
b. Sub Kegiatan: <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				
	• Tersusunnya Dokumen Capaian IKU Perangkat Daerah • Tersedianya dokumen bukti dukung SAKIP • Tersusunnya Dokumen LPPD/LKPJ • Tersusunnya Dokumen TEPR • Tersusunnya Dokumen LAKIP	• Jumlah Dokumen Capaian IKU Perangkat Daerah (Dokumen) • Jumlah dokumen bukti dukung SAKIP (Dokumen) • Jumlah Tersusunnya Dokumen LPPD/LKPJ (Dokumen) • Jumlah Tersusunnya Dokumen TEPR (Dokumen) • Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	• 1 • 1 • 1 • 1 • 1	Cascading
c. Sub Kegiatan: <i>Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>				
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	Renstra dan Cascading
d. Sub Kegiatan: <i>Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah</i>				
	Tersedianya Data Sektoral Perangkat Daerah	Persentase Data Sektoral Perangkat Daerah	100 %	Cascading

Program :

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran:

Rp.10.009.457.000,86

Kegiatan :

- I. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp.49.830.000
- II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp.9.292.412.528,24
- III. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.56.062.272,63
- IV. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.388.323.799,99
- V. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.222.828.400

Mengetahui/menyetujui,

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

Palu, 20 Februari 2026

Yang Menyusun,

**SEKRETARIS DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NENCY AINUN, S.Stp, M.Si
Pembina
NIP. 19810501 200012 001

PERJANJIAN KINERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HASNA, S.Sos, M.AP**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : **Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd**
Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2026



Pihak Kedua,

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd

Pihak Pertama,

HASNA, S.Sos, M.AP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Esselon III

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	2	3	4	5
Program: Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
	Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	- Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (Hari) - Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara (US\$)	3-5 600	Renstra dan Cascading
1. Kegiatan: Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				
	Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Dokumen)	2	Renstra
	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Dokumen)	2	Cascading
a. Sub Kegiatan: Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				
	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Dokumen)	2	Renstra
	Tersusunnya Dokumen Kajian Potensi Desa Wisata Labuan Belanda Kab. Tojo Unauna	Jumlah Dokumen Kajian Potensi Desa Wisata Labuan Belanda Kab. Tojo Unauna yang tersusun (Dokumen)	1	Cascading
2. Kegiatan: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				
	- Terkelolanya Destinasi Pariwisata Provinsi - Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - Tersedianya perencanaan destinasi pariwisata provinsi	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) - Jumlah Dokumen perencanaan destinasi pariwisata provinsi	2 2	Renstra dan Cascading

a. Sub Kegiatan: <i>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</i>				
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3	Renstra
	Terfasilitasinya perencanaan dan Pembangunan Rumah Kreatif Gula Aren di Kab. Tolitoli	Jumlah perencanaan dan Pembangunan Rumah Kreatif Gula Aren di Kab. Tolitoli yang difasilitasi (Unit)	1	Cascading

Program :	Anggaran:
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.267.882.095,40
Kegiatan :	
I. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp.167.882.095,30
II. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp.100.000.000,10

Mengetahui/menyetujui,

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

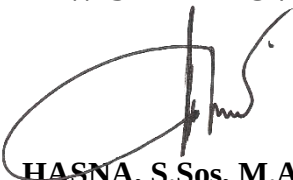


Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

Palu, 20 Februari 2026

Yang Menyusun,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
DINAS PARIWISATA PROV. SULTENG**



HASNA, S.Sos, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19711121 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **JOYCE SAGITA NOVYANTI , SE, MM**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran
Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : **Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd**
Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd

JOYCE SAGITA NOVYANTI, SE, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Esselon III

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	2	3	4	5
Program: Pemasaran Pariwisata				
	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	- Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang) - Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Juta Orang)	28750 9925000	Renstra dan Cascading
1. Kegiatan: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				
	- Terpromosinya Produk Pariwisata Unggulan ke Mancanegara - Terlaksananya Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik dalam dan luar negeri - Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	- Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) - Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	2 4	Renstra dan Cascading
a. Sub Kegiatan: Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				
	- Tersedianya Data Kunjungan Wisman - Terpromosinya Potensi Wisata Sulteng di Media Sosial - Tersedianya hasil analisa segmen pasar wisatawan mancanegara - Tersedianya bahan promosi pariwisata untuk wisatawan mancanegara - Tersedianya Kalender Event Daerah	- Jumlah Laporan data kunjungan Wisman (Laporan) - Jumlah Media Sosial yang digunakan (Media) - Jumlah Laporan hasil analisa segmen pasar wisatawan mancanegara (Laporan) - Jumlah buku data kunjungan wisatawan yang tersusun (Jenis) - Jumlah Dokumen Kalender Event Daerah	1 2 1 4 1	Cascading

b. Sub Kegiatan: <i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				
	• Terpromosinya Event Daerah • Tersedianya hasil analisis segmen pasar wisatawan nusantara • Terfasilitasinya mitra pariwisata dalam pameran / kegiatan promosi lainnya • Terfasilitasinya peminjaman baju adat • Terfasilitasinya dukungan event pariwisata daerah • Tersedianya data kunjungan Wisnus • Terfasilitasinya event daerah dalam Karisma Event Nusantara • Terfasilitasinya penjemputan tamu	• Persentase Event Daerah yang dilaksanakan • Jumlah Laporan hasil analisa segmen pasar wisatawan mancanegara (Laporan) • Persentase mitra pariwisata yang terfasilitasi • Persentase peminjaman baju adat yang terfasilitasi • Jumlah Event daerah yang terfasilitasi (Event) • Jumlah Laporan data kunjungan Wisnus (Laporan) • Persentase Event daerah yang didampingi • Persentase penjemputan tamu yang terfasilitasi	• 100% • 1 • 100% • 100% • 2 • 2 • 100% • 100%	Cascading

Program :	Anggaran:
Pemasaran Pariwisata	Rp.145.540.000
Kegiatan	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp.145.540.000

Mengetahui/menyetujui,



**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

Palu, 20 Februari 2026

Yang Menyusun,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA PROV. SULTENG**



JOYCE SAGITA NOVYANTI, SE, MM
Pembina
NIP. 19781122 200904 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ILHAM ARIFIN, SH**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif,
Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : **Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd**
Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2026



Pihak Kedua,

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd

Pihak Pertama,

ILHAM ARIFIN, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Esselon III

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	2	3	4	5
Program: Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				
	Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)	143.750.000.000	Renstra dan Cascading
1. Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				
	• Terasilitasinya Sarana dan Prasarana Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif • Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	• Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif (Laporan) • Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik (Dokumen)	• 1 • 2	Renstra dan Cascading
a. Sub Kegiatan: Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik				
	• Terasilitasinya kegiatan Pameran Pelaku Ekraf Kain Batik Subi	• Jumlah Laporan kegiatan Pameran Pelaku Ekraf Kain Batik Subi (Laporan)	• 1	Cascading

	• Terfasilitasinya Bantuan yang diserahkan kepada pelaku usaha Ekonomi Kreatif	• Persentase Bantuan yang diserahkan kepada pelaku usaha Ekonomi Kreatif	• 100%	
--	--	--	--	--

2. Kegiatan: Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				
	Meningkatnya Pelaku Ekraf yang Berdaya Saing	• Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Dokumen) • Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen) • Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual (Orang)	• 1 • 1 • 1	Renstra
	• Terlaksananya kegiatan konsultasi kekayaan intelektual • Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	• Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual (Orang) • Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Dokumen)	• 4 • 1	Cascading
a. Sub Kegiatan: Fasilitasi Kekayaan Intelektual				
	• Terlaksananya kegiatan konsultasi Kekayaan Intelektual • Terjalinnya kerjasama penerbitan HAKI	• Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi Kekayaan Intelektual (Orang) • Jumlah Dokumen kerjasama penerbitan HAKI (Dokumen)	• 10 • 1	Cascading

b. Sub Kegiatan: <i>Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah</i>				
	• Terlaksananya Data pelaku Ekraf • Tersedianya Dokumen Rekomendasi pengembangan Ekonomi Kreatif	• Jumlah dokumen data pelaku ekraf (Dokumen) • Jumlah Dokumen Rekomendasi pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	• 1 • 1	Cascading

Program :	Anggaran:
Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp.3.607.056.100
Kegiatan	
I. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Rp.3.600.056.100
II. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp.7.000.000

Mengetahui/menyetujui,

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

Palu, 20 Februari 2026

Yang Menyusun,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF, PEMANFAATAN
DAN PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DINAS PARIWISATA PROV. SULTENG**



ILHAM ARIFIN, SH
Pembina
NIP. 19870121 200604 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **WIDYAWATI, SS., M.Sc**

Jabatan : **Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd**

Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd

WIDYAWATI, SS., M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BIDANG SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	2	3	4	5
Program: Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				
	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	- Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata (Orang) - Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Orang) - Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Pariwisata Yang Tersertifikasi (Orang) - Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Yang Tersertifikasi (Orang)	9.259 2.571 200 200	Renstra
		Persentase Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	22,5 %	Cascading
1. Kegiatan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				
	Tersertifikasinya Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlatih dan tersertifikasinya Tenaga Kerja Pariwisata & Ekraf tingkat Lanjutan (Orang)	200	Renstra
	- Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata - Berkembangnya kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	- Jumlah Masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata (Dokumen) - Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI	2 3	Cascading
a. Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				

	Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	209	Renstra
	Tersertifikasinya Pemandu Wisata Paralayang	Jumlah Pemandu Wisata Paralayang yang tersertifikasi (Orang)	20	Cascading
2. Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				
	Terlatihnya Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlatih & Tersertifikasinya Pelaku Ekraf	200	Renstra
	- Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi dibidang ekonomi kreatif - Terlaksananya Fasilitasi sertifikasi kompetensi subsektor Ekonomi Kreatif	- Jumlah Orang yang disertifikasi Kompetensi dibidang ekonomi kreatif (Dokumen) - Jumlah orang yang di Fasilitasi sertifikasi kompetensi subsektor Ekonomi Kreatif (Dokumen)	2 2	Cascading
a. Sub Kegiatan: Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif				
	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif (Orang)	60	Renstra
	Tersertifikasinya Asisten Barista/Café di Kota Palu	Jumlah Asisten Barista/Café di Kota Palu yang disertifikasi (Orang)	25	Cascading

Program :
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Anggaran:
Rp.295.266.340

Kegiatan

- I. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Rp.126.144.975
- II. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia
Pariwisata dan Ekraf Tingkat Lanjutan

Rp.169.121.365

Mengetahui/menyetujui,

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

Palu, 20 Februari 2026

Yang Menyusun,

**KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

WIDYAWATI, SS., M.Sc
Pembina
NIP. 19710822 200502 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **ACHMAD KHOMAINI, S.Kom**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **NENCY AINUN, S.Stp, M.Si**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan pihak ke satu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2026



Pihak Kedua,

NENCY AINUN, S.Stp, M.Si

Pihak Pertama,

ACHMAD KHOMAINI, S.Kom

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	2	3	4	5
1.	Kegiatan: <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	Renstra
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	
		Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,52	Cascading
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegritas	89,55	
a. Sub Kegiatan: <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>				
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	Renstra
	Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Komunikasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum	2	Cascading

		Komunikasi Publik (FKP)		
	Terkelolanya arsip dinamis (fisik atau digital) sesuai dengan kaidah kearsipan	Persentase arsip dinamis yang tertata sesuai kode klasifikasi	95 %	Cascading
b. Sub Kegiatan: <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>				
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	Renstra
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	4	Cascading
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	4	Cascading
2. Kegiatan: <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	Renstra
		- Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah - Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah - Nilai Hasil Survey Implementasi ASN berAKHLAK	78,12 35,64 66,28	Cascading
a. Sub Kegiatan: <i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	63	Renstra
	Tersedianya administrasi kedisiplinan dan kompetensi pegawai	Persentase administrasi kedisiplinan dan kompetensi pegawai yang disediakan	95 %	Cascading
	Terbaruinya dokumen penilaian RB Perangkat Daerah	Persentase dokumen dokumen penilaian RB	80 %	Cascading

		Perangkat Daerah yang tersedia		
	Tersedianya dokumen EVJAB Perangkat Daerah	Jumlah dokumen EVJAB Perangkat Daerah yang disiapkan (Dokumen)	1	Cascading
	Tersedianya informasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Persentase informasi yg disediakan	80 %	Cascading
b. Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	63	Renstra
	Terfasilitasinya administrasi kenaikan pangkat, berkala, pencantuman gelar, cuti, pensiun, mutasi ASN, Satya Lencana, SK JAFUNG, Tugas Belajar, KARSU, TAPERA	Persentase Administrasi kenaikan pangkat, berkala, pencantuman gelar, cuti, pensiun, mutasi ASN yang difasilitasi	100 %	Cascading
	Tersedianya Dokumen ANJAB/ABK Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen ANJAB/ABK yang disiapkan	1	Cascading
	Terbaruinya administrasi kepegawaian ASN	Persentase administrasi kepegawaian ASN yang diperbarui	100 %	Cascading
c. Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	Renstra
	Terkumpulnya dokumen inovasi perangkat daerah	Persentase dokumen inovasi perangkat daerah yang dikumpulkan	80 %	Cascading
	Tersusunnya dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Perangkat Daerah	Persentase dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Perangkat Daerah yang disusun	80 %	Cascading
3. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	Renstra

		- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 2 1	
		Persentase Kematangan Penerapan SPBE Pada PD	80 %	Cascading
	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	21,50	Cascading
	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	- Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) - Persentase Tindaklanjut Laporan pengaduan melalui SP4N Lapor	66,17 80 %	Cascading
a. Sub Kegiatan: <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>				
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Renstra & Cascading

b. Sub Kegiatan: <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>				
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Renstra
	Tersedianya data produk dalam negeri	Persentase data produk dalam negeri yang disediakan	80 %	Cascading
c. Sub Kegiatan: <i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>				
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	Renstra & Cascading

d. Sub Kegiatan: <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP</i>				
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	Renstra
	Tersedianya dokumen penilaian SPBE Perangkat Daerah	Persentase dokumen penilaian SPBE yang dapat disiapkan	80 %	Cascading
	Terkompilasinya dokumen pemenuhan LKE Pembangunan ZI	Jumlah dokumen ZI yang disiapkan sesuai kebutuhan (Dokumen)	2	Cascading
	Terkelolanya aduan masyarakat melalui SP4N LAPOR	Persentase aduan masyarakat melalui SP4N LAPOR yang ditangan	80 %	Cascading
	Tersedianya Laporan Standar Pelayanan (SP)	Jumlah Laporan hasil penilaian Standar Pelayanan (SP) (Laporan)	1	Cascading

Kegiatan :

- I. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Rp. 388.323.799,99
- II. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Rp.56.062.272,63

Sub Kegiatan :

Anggaran:

- I. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Rp.171.823.800
- II. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Rp.32.116.754
- III. Penyediaan Cetakan dan penggandaan
- Rp.18.158.079,02
- IV. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Rp.216.499.999,99
- V. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Kantor
- Rp.5.010.039,61

Palu, 20 Februari 2026

Mengetahui/menyetujui,

Yang Menyusun,

**SEKRETARIS DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PARIWISATA PROV. SULTENG**



NENCY AINUN, S.Stp, M.Si
Pembina
NIP. 19810501 200012 001



ACHMAD KHOMAINI, S.Kom
Penata
NIP. 19810617 200501 1 016

PERJANJIAN KINERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **RANI ADELIA, SE, MM**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **NENCY AINUN, S.Stp, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan pihak ke satu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 20 Februari 2026



Pihak Kedua,

NENCY AINUN, S.Stp, M.Si

Pihak Pertama,

RANI ADELIA, SE, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	2	3	4	5
1.	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan) - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	63 1 12	Renstra
		- Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP - Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	100 % 100 %	Cascading
a.	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	63	Renstra
	Terdistribusinya pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP. (Tersusunnya Dokumen usulan gaji dan tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12	Cascading
b.	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			

	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	Renstra & Cascading
c. Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	Renstra
	Tersusunnya Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD		1	Cascading
	Tersusunnya Dokumen bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	Cascading
	Terverifikasinya Dokumen Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	Cascading
2. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	Renstra
		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	Cascading
a. Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	Renstra

	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	Cascading
	Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	Cascading
3. Kegiatan: <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket) - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 1 1	Renstra
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	100 %	Cascading
a. Sub Kegiatan: <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>				
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	Renstra
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	Cascading
4. Kegiatan: <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara &	13	Renstra

		Dibayarkan Pajak (Unit) - Jumlah Sarana & Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) - Jumlah Peralatan & Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1 28	
		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	Cascading
a. Sub Kegiatan: <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>				
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	Renstra
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	Cascading
b. Sub Kegiatan: <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>				
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	28	Renstra
	Terpeliharanya Peralatan kantor dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan Mesin lainnya yang dipelihara	14	Cascading

Kegiatan :

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| I. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 9.292.412.528,24 |
| II. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD | Rp. 222.828.400 |

Sub Kegiatan :

Anggaran:

- | | | |
|------|--|---------------------|
| I. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp.9.197.332.528,24 |
| II. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rp.70.080.000 |
| III. | Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD | Rp.25.000.000 |
| IV. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp.208.958.400 |
| V. | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Rp.13.870.000 |

Palu, 20 Februari 2026

Yang Menyusun,

**KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET
DINAS PARIWISATA PROV. SULTENG**



RANI ADELIA, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19850502 201101 2 006

Mengetahui/menyetujui,

**SEKRETARIS DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



NENCY AINUN, S.Stp, M.Si
Pembina
NIP. 19810501 200012 001